



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 93 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN GARUT KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN GARUT KOTA TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 93**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN GARUT KOTA
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun.

Kecamatan Garut Kota sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Garut Kota telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta *Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat*” yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja

SKPD/Kecamatan Garut Kota Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu, Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Garut Kota tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut;
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Garut Kota guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Garut Kota;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GARUT KOTA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.1.1 Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Garut Kota tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Garut Kota sudah disahkan.

2.1.2 Capaian target Renstra Kecamatan Garut Kota berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Garut Kota tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Garut Kota;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Garut Kota;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut;

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Garut Kota.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GARUT KOTA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Garut Kota Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Garut Kota Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Garut Kota ini menyajikan selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Garut Kota Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 10.131.269.646,- dengan kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 30.788.900,-
 - ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 8.144.653.081,- dengan Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran Rp. 8.124.903.081,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran Rp. 19.750.000,-
 - ❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran Rp. 15.000.000,-
 - ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 1.237.296.165,- dengan Sub Kegiatan :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 78.391.700,-

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp. 624.791.765,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 69.536.200,-
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran Rp. 167.557.300,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp. 38.459.200,-
- Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp. 155.600.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran Rp. 102.960.000,-
- ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah Rp. 42.153.700,- dengan Sub kegiatan :
Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 42.153.700,-
 - ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah Rp. 107.566.300,- dengan Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 69.555.300,-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp. 14.200.000,-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran Rp. 23.811.000,-
 - ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah anggaran Rp. 553.811.500,- dengan Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran Rp. 29.010.000,-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran Rp. 524.801.500,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 420.960.800,- dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, anggaran Rp. 420.960.800,-
 - ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 71.879.500,- dengan Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, anggaran Rp. 71.879.500,-
3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, jumlah anggaran dengan kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan Sub Kegiatan :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, anggaran Rp. 163.183.500,-
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, anggaran Rp. 9.073.025.503,-
 - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, anggaran Rp. 501.667.410
 - ❖ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 3.927.178.000,-
 4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum, dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, anggaran Rp. 163.544.200,-
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan termasuk semua Kelurahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.100,-
 - Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Renja 2021

1) Realisasi Program/Kegiatan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota dalam pelaksanaan Renja 2021, antara lain :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 10.131.269.646,- dengan kegiatan sebagai berikut :

❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran Rp. 30.788.900,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.788.900,-

❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 8.583.657.821,- dengan Sub Kegiatan :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran Rp. 8.144.653.081,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.708.344.615,-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran sebesar Rp.19.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.710.000,-

❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran Rp. 15.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.700.000,-

❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 78.391.700,- dengan realisasi anggaran Rp. 70.760.300,-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp. 624.791.765,- dengan realisasi anggaran Rp. 580.395.900,-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 69.536.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 65.524.600,-

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran Rp. 155.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 153.880.000,-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp. 38.459.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 38.336.400,-

Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp. 155.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 153.880.000,-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran Rp. 102.960.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 101.610.000

❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah Rp. 42.153.700,- dengan Sub kegiatan :

Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 42.153.700,- dengan realisasi anggaran Rp. 41.954.000,-

- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 69.555.300,- dengan realisasi anggaran Rp. 36.332.048,-

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp. 14.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.780.000,-

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran Rp. 23.811.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.500.500,-

- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran Rp. 29.010.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 24.010.000,-

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran Rp. 524.801.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 522.847.000

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, jumlah anggaran Rp. 492.840.300,- dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 420.960.800,- dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, anggaran sebesar Rp. 420.960.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 402.977.400,-

- ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 71.879.500,- dengan Sub Kegiatan :

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, anggaran Rp. 71.879.500 dengan realisasi anggaran Rp. 57.350.000,-

3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan Sub Kegiatan :

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, anggaran 163.183.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 159.583.500,-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, anggaran sebesar Rp. 9.073.025.503,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.006.068.269

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, anggaran Rp. 501.667.410,- dengan realisasi anggaran Rp. 488.319.250,-

❖ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 3.927.178.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.924.928.000,-

❖ Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Pencegahan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dengan anggaran Rp. 112.657.580,- dengan realisasi anggaran Rp. 112.657.370,-

Penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dengan anggaran Rp. 1.771.417.862,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.761.235.580,-

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, dengan Kegiatan sebagai berikut :

❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp. 163.544.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 154.947.000,-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan sebagai berikut :

❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan termasuk semua Kelurahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 197.724.100,-

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota dalam pelaksanaan Renja Tahun 2021 dari 13 Kegiatan terdapat 12 (dua belas) Kegiatan (92,93%) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan**

No	Program/Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.131.269.646	9.600.837.963	94,76
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.144.863.081	7.728.054.615	94,88
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.124.903.081	7.708.344.615	94,87
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.750.000	19.710.000	99,80
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	14.700.000	98,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	14.700.000	98,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	940.276.965	877.044.500	93,27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.391.700	70.760.300	90,27
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	624.791.765	580.395.900	92,89
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.536.200	65.524.600	94,23
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	167.557.300	160.363.700	95,71
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.459.200	38.336.400	99,68
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	155.600.000	153.880.000	98,89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.960.000	101.610.000	98,69
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.153.700	41.954.000	99,53
	Pengadaan Mebel	42.153.700	41.954.000	99,53
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.566.300	67.612.548	62,85
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.555.300	36.332.048	52,23
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.200.000	12.780.000	90,00

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.811.000	18.500.500	77,70
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.811.500	546.857.000	98,74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.010.000	24.010.000	82,76
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	524.801.500	522.847.000	99,63
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	492.840.300	460.327.400	93,40
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	420.960.800	402.977.400	95,73
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	420.960.800	402.977.400	95,73
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	71.879.500	57.350.000	79,79
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71.879.500	57.350.000	79,79
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.549.129.855	15.452.791.969	99,38
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.665.054.413	13.578.899.019	99,36
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	163.183.500	159.583.500	97,79
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9.073.025.503	9.006.068.269	99,26
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	501.667.410	488.319.250	97,34
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.927.178.000	3.924.928.000	99,94
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1.884.075.442	1.873.892.950	99,45
	Pencegahan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	112.657.580	112.657.370	99,99
	Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1.771.417.862	1.761.235.580	99,43

4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	163.544.200	154.947.000	94,74
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	163.544.200	154.947.000	94,74
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	163.544.200	154.947.000	94,74
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	200.000.100	197.724.100	98,86
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	200.000.100	197.724.100	98,86
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.100	197.724.100	98,86

Sumber : LRA Program Kegiatan SIPKD Kecamatan Garut Kota 31 Desember 2021

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.131.269.646	9.600.837.963	94,76
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.788.900	30.788.900	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.788.900	30.788.900	100

Sumber : LRA Program Kegiatan SIPKD 31 Desember 2021

- 2) Pada tahun anggaran 2021, ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota.
- 3) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya perubahan anggaran pada program/kegiatan karena adanya penyesuaian anggaran karena adanya Wabah Covid 19, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan.
 - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
 - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 4) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis /Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut :

- 1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Garut Kota pada umumnya.
 - 2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Garut Kota
- 5) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubbag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Kelurahan.

2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2021

Renstra SKPD Kecamatan Garut Kota merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Garut Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Garut Kota yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Garut Kota
Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan ditingkat Kecamatan	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	81	Triwulan 1				
					Triwulan 2	81	82,72	100	
					Triwulan 3				
					Triwulan 4	81	82,72	100	
					Kondisi Akhir (F)	82,72	100		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.1 Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	%	81	Triwulan 1				
					Triwulan 2				
					Triwulan 3				
					Triwulan 4	81	95	100	
					Kondisi Akhir (F)	95	100		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	3.1 Nilai Sakip Kecamatan	Opini	B	Triwulan 1				
					Triwulan 2				
					Triwulan 3				
					Triwulan 4	B	BB	100	
					Kondisi Akhir (F)	BB	100		
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	4.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%i	80	Triwulan 1				
					Triwulan 2				
					Triwulan 3				
					Triwulan 4	80	99,38	100	
					Kondisi Akhir (F)	99,38	100		

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Garut Kota Tahun 2022

Keterangan

Warna



Prosentase

n/a

< 100%

= 100%

> 100%

Keterangan

Tidak Ada Target

Tidak Tercapai

Tercapai

Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 81 point pencapaiannya sampai 82,72 point, Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dari target 81% pencapaiannya 95%, Nilai Sakip Kecamatan dari Target B pencapaiannya BB, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dari Target 80% pencapaiannya 99,38%
2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga Triwulan IV anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2021-2024 pada tahun ke 2 pelaksanaan Renstra Kecamatan Garut Kota dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Garut Kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Garut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Wajib									
7.01	Bidang Urusan Pemerintahan									
7.01.7.01.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran	100%		100%	94,76%	94,76%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%	94,88%	94,88%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%		100%	94,87%	94,87%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%		100%	99,80%	99,80%	100%	100%	100%

7.01.7.01.18.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%		100%	98%	98%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%		100%	98%	98%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%		100%	94,63%	94,63%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian pemenuhan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	90,27%	90,27%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian pemenuhan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	92,89%	92,89%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian pemenuhan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	94,23%	94,23%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian pemenuhan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	95,71%	95,71%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian pemenuhan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	99,68%	99,68%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian pemenuhan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	98,89%	98,89%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian pemenuhan dokumen administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	98,69%	98,69%	100%	100%	100%

7.01.7.01.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan barang milik daerah	100%		100%	99,53%	99,53%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Capaian pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%		100%	99,53%	99,53%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%		100%	-	-	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%		100%	-	-	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%		100%	62,85%	62,85%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	52,33%	52,33%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	90%	90%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	77,70%	77,70%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%		100%	98,74%	98,74%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%		100%	82,76%	82,76%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%		100%	99,63%	99,63%	100%	100%	100%

7.01.7.01.18.02.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%		100%	93,40%	93,40%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		100%	95,73%	95,73%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.02.2.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian pemenuhan Kegiatan Koordinasi	100%		100%	95,73%	95,73%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.02.2.02.03.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	100%		100%	79,79%	79,79%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian pemenuhan laporan penyelenggaraan PATEN	100%		100%	79,79%	79,79%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%		100%	99,38%	99,38%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.03.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen RPTK Tingkat Kelurahan	100%		100%	99,38%	99,38%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Capaian pemenuhan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%		100%	97,79%	97,79%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Capaian pemenuhan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%		100%	99,26%	99,26%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Capaian pemenuhan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%		100%	97,34%	97,34%	100%	100%	100%

7.01.7.01.18.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Perentase Pemberda yaan Lembaga Kemasya rakatan Tingkat Kecamatan	100%		100%	99,94%	99,94%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Capaian pemenuhan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%		100%	99,94%	99,94%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%		100%	94,45%	94,45%	-	-	-
7.01.7.01.18.03.05.01	Pencegahan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah laporan Pencegahan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%		100%	100%	100%	-	-	-
7.01.7.01.18.03.05.02	Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah laporan Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%		100%	99,43%	99,43%	-	-	-
7.01.7.01.18.04.	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%		100%	94,74%	94,74%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.04.2.01.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satpol PP	100%		100%	94,74%	94,74%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian pemenuhan laporan penanganan gangguan trantibum	100%		100%	94,74%	94,74%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%		100%	98,86%	98,86%	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100%		100%	98,86%	98,86%	100%	100%	100%

7.01.7.01.18.05.2.01.01.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
7.01.7.01.18.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	100%	98,86%	100%	98,86%	98,86%	100%	100%	100%

Sumber : LRA Program Kegiatan SIPKD Kecamatan Garut Kota 31 Desember 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Garut Kota sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81,5	83	84	85	82,72	83	84	85	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	85	87	88	7,46	85	87	88	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			-	85	86	87	85	85	86	87	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			B	B	B	B	BB	B	B	B	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Garut Kota Tahun 2022

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
2. Peningkatan pelayanan publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, penanggulangan kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam.

Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Garut Kota bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Penanganan Kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yakni tercapainya visi Kabupaten Garut. Penanganan Kemiskinan dilaksanakan dengan adanya kegiatan berupa bantuan dari Dinas dan Lembaga Pemerintah lainnya di Kabupaten Garut kepada Masyarakat miskin dilingkungan Kecamatan Garut Kota.

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan

peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penanganan Stunting dan penurunan Angka Kematian Ibu yaitu dengan pelaksanaan pendataan Stunting langsung kepada masyarakat dilingkungan Kecamatan Garut Kota, selanjutnya diberikan bantuan berupa makanan bergizi dan penyuluhan-penyuluhan oleh Puskesmas, DPPKBP3A untuk penurunan angka kematian Ibu dan anak di Kecamatan Garut Kota.

2) Peningkatan pelayanan publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, penanggulangan kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

Untuk mendukung peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, penanggulangan kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak dilaksanakan dengan kegiatan pengajian-pengajian di Mesjid dilingkungan Masyarakat Kecamatan Garut Kota, kegiatan Bhakti Sosial Masyarakat tiap Kelurahan, kegiatan penyuluhan dari Dinas Sosial dan DPPKBP3A.

3) Peningkatan Sumber Daya Manusia

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

4) Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;

Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dilaksanakan dengan adanya keringanan biaya pendidikan bagi Murid Sekolah yang tidak mampu, bidang kesehatan adanya bantuan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, pekerjaan umum adanya bantuan dana dari Pemerintah untuk UMKM di masyarakat, bidang perumahan rakyat adanya bantuan Rumah Tapak bagi masyarakat korban banjir, serta pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial dengan koordinasi Forkopimcam di Kecamatan Garut Kota.

5) Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam

Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam dilaksanakan oleh Forkopimcam Kecamatan Garut Kota dengan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

2.4 Review terhadap RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Garut Kota serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja

SKPD Se-Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Garut Kota

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Garut Kota sebesar Rp. 35.809.063.825,-

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Garut Kota diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Garut Kota mengusulkan 6 Program dengan 14 kegiatan, 40 Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Garut Kota mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Garut Kota

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan 2023					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Garut Kota	Prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	100%	18,506,062,500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Garut Kota	Prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	100%	18,506,062,500	
	Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Garut Kota	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	37.254.000	Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Garut Kota	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	37.254.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Garut Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	7.254.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Garut Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	7.254.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Garut Kota	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Garut Kota	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Garut Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Garut Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Garut Kota	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Garut Kota	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Garut Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Garut Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Garut Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Garut Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Garut Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Garut Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Garut Kota	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8,980,516,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8,980,516,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Garut Kota	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	8.957.705.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Garut Kota	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	8.957.705.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Garut Kota	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	22.811.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Garut Kota	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	22.811.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Garut Kota	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	18,127.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Garut Kota	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	18,127.500	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Garut Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 paket	8.127.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Garut Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 paket	8.127.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Garut Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Garut Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 orang	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Garut Kota	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,497,125,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Garut Kota	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,497,125,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Garut Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	94.853.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Garut Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	94.853.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Garut Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	750.998.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Garut Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	750.998.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Garut Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	84.138.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Garut Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	84.138.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Garut Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	202.744.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Garut Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	202.744.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Garut Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	46.535.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Garut Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	46.535.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Garut Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	188.276.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Garut Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	188.276.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Garut Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	124,581,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Garut Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	124,581,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Garut Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Garut Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Garut Kota	Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	7.172.775.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Garut Kota	Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	7.172.775.000	
	Pengadaan Mebel	Garut Kota	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 unit	51.005.000	Pengadaan Mebel	Garut Kota	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 unit	51.005.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Garut Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	25,970,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Garut Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	25,970,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Garut Kota	Jumlah Unit Gedung kantor yang dibangun Jumlah pengadaan tanah	4 unit, 2 lokasi	7.095.800.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Garut Kota	Jumlah Unit Gedung kantor yang dibangun Jumlah pengadaan tanah	4 unit, 2 lokasi	7.095.800.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Garut Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	130.154.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Garut Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	130.154.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Garut Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	84.161.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Garut Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	84.161.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Garut Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	17.182000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Garut Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	17.182000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Garut Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediaka	12 laporan	28.811.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Garut Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediaka	12 laporan	28.811.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Garut Kota	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	670.111.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Garut Kota	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	670.111.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Garut Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 unit	35.102.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Garut Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 unit	35.102.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Garut Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Gedung	635.009.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Garut Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Gedung	635.009.000	

II	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Garut Kota	Prosentase Pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100%	596.336.000	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Garut Kota	Prosentase Pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100%	596.336.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Garut Kota	Prosentase pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	509.362.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Garut Kota	Prosentase pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	509.362.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Garut Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	509.362.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Garut Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	509.362.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Garut Kota	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	86.974.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Garut Kota	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	86.974.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Garut Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	86.974.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Garut Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	86.974.000	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Garut Kota	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100%	15.983.783.325	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Garut Kota	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100%	15.983.783.325	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	11 Kelurahan	11.231.898.325	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	11 Kelurahan	11.231.898.325	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kelurahan	197.452.000	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kelurahan	197.452.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	11 Kelurahan	9.459.368.657	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	11 Kelurahan	9.459.368.657	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11 Kelurahan	1.562.632.668	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11 Kelurahan	1.562.632.668	
	Evaluasi Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11 Kelurahan	12.445.000	Evaluasi Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11 Kelurahan	12.445.000	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Garut Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11 laporan	4.751.885.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Garut Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11 laporan	4.751.885.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Garut Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 laporan	4.751.885.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Garut Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 laporan	4.751.885.000	
IV	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Garut Kota	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Trantibum	100%	234.983.000	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Trantibum		234.983.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Garut Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	234.983.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Garut Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	234.983.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Garut Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	179.898.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Garut Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	179.898.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Garut Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	55.085.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Garut Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	55.085.000	
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Garut Kota	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemerintahan Umum	100%	306.929.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Garut Kota	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemerintahan Umum	100%	306.929.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Garut Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	306.929.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Garut Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	306.929.000	
	Pembinaan Wawasan kebangsaan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Garut Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	30 orang	9.929.000	Pembinaan Wawasan kebangsaan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Garut Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	30 orang	9.929.000	

			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Garut Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 orang	55.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Garut Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 orang	55.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Garut Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	242.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Garut Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	242.000.000	
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Garut Kota	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	100%	180.970.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Garut Kota	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	100%	180.970.000	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Garut Kota	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	100%	180.970.000	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Garut Kota	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	100%	180.970.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Garut Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 dokumen	180.970.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Garut Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 dokumen	180.970.000	
JUMLAH					35.809.063.825	JUMLAH					35.809.063.825

Sumber : Pengolahan Data SIPD Kecamatan Garut Kota Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Garut Kota melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Garut Kota mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Kelurahan)	Volume	Pagu	SKPD Penanggung jawab
					6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Yang Memadai, Lingkungan Yang Sehat Serta Pengelolaan Kebencanaan	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai	1 Program Pengembangan Perumahan	1 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Lingkungan Bagi Korban Bencana atau Relokasi	Cimuncang RW 6 dan 9	1000 M	1.000.000.000	Dinas Perkim
						Sukamentri 5 RW	5 Lokasi	350.000.000	
					Perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) Permukiman Bagi Korban Bencana atau Relokasi	Margawati RT 3 RW 3	300 M	300.000.000	
						Ciwalen RW 2	200 M	200.000.000	
						Sukanegla RW10	1 Kegiatan		
						Regol RW 16	150 M	130.000.000	
						Muarasanding	8 RW	300.000.000	

				2	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Untuk Cegah Kumuh	Pakuwon	9 RW/25 Rumah	437.500.000		
							Margawati RW 24	20 Unit	400.000.000		
							Paminggir RW 17	4 Unit	892.500.000		
							Ciwalen RW 8 dan 14	20 Unit	400.000.000	Dinas Perkim	
							Kota Kulon RW 15,19 dan 22	19 Unit	380.000.000		
			2	Penataan Bangunan Gedung	3	Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Posyandu	Paminggir RW 2,4,6,9,12 dan 15	6 RW	300.000.000	Dinas PUPR
							Kota Wetan	23 RW	300.000.000		
2	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi, UMKM, Industri, Perdagangan dan Nilai Investasi Daerah Dalam Mendorong Perekonomian Daerah	1	Program Pengembangan UMKM	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha kecil	Layanan Desain Dan Kemasan (Pengadaan Mesin Jahit Sarung Tangan)	Cimuncang	-	200.000.000	Diskop dan UMKM

					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelambagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Bantuan Perkuatan Modal	Kota Kulon RW 1,8 dan 20	3 RW	300.000.000		
							Ciwalen RW 10	1 Paket	250.000.000		
							Kota Wetan 23 RW	23 paket	500.000.000		
							Paminggir	17 RW	100.000.000		
							Regol RW 2,9,12 dan 20	4 RW	100.000.000		
							Pakuwon	11 RW	500.000.000		
							Sukamentri	25 RW	500.000.000		
			2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten /Kota	Bantuan sarana Usaha Peternak Sapi Potong	Margawati RW 20	100 Ekor	100.000.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Bantuan Sarana Produksi Tanaman	Sukanegla RW 16	3 Unit	50.000.000	Dinas Pertanian

					Pertanian	Pangan					
			3	Hibah Uang Untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW			Muarasanding	19 RW	450.000.000	DPMD	
3	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bantuan Guru Ngaji	Margawati	27 RW	60.000.000	SETDA
							Cimuncang		750.000.000		
							Kota Wetan	23 RW	138.000.000		
4	Peningkatan Pengelolaan Seni, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pelayanan Keagamaan	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Bermartabat, Memiliki Etika Serta Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Agama	2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penyediaan Suplai Makanan Bergizi Pencegahan Stunting	Regol	500 Orang	500.000.000	
							Muarasanding	19 RW	300.000.000	Dinas Kesehatan	
							Sukanegla	-	100.000.000		
							Pakuwon	11 RW	50.000.000		
							Ciwalen	14 RW	200.000.000		
							Sukamentri	25 RW	50.000.000		

			3	Pelatihan Kader Dasawisma	3	Meningkatkan Peran Serta Kader Dasawisma Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Paminggir	17 RW	126.000.000	DPMD
			4	Program Pengembangan Kebudayaan	4	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Tradisi Kebudayaan	Bantuan Alat Keseniaan	Kota Kulon 1,3 dan 11	3 RW	300.000.000	Disparbud
5	Peningkatan Kualitas aparatur pemerintah yang di tunjang dengan sarana dan prasarana	Meningkatnya Kuantitas aparatur dengan sarana dan prasarana yang memadai	1	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Pengadaan Mebeuler		Sukanegla	1 Paket	50.000.000	Dnas Pendidikan
			2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Pembinaan RT/RW	Paminggir	100 Orang	65.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

			3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	3	Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perbaiki Sarana Keagamaan Untuk Cegah Kumuh	Regol RW 5, 13 dan 15	3 Unit	50.000.000	Disperkim
			3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	3	Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perbaiki Sarana Keagamaan Untuk Cegah Kumuh	Regol RW 5, 13 dan 15	3 Unit	50.000.000	Disperkim

Sumber : Pengolahan data hasil Musrenbang Kecamatan Garut Kota Tahun 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahuan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Garut Kota guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 2 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemananan serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Garut Kota di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Garut Kota yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Garut Kota telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Garut Kota mempunyai **tujuan : “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Profesionalisme dalam Pelayanan Publik”**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

3. Predikat SAKIP

4. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2023

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Prosentase Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	87
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat SAKIP	B
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	86

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Garut Kota Tahun 2022

3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Garut Kota sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Garut Kota diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Garut Kota merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

Pencapaian MDG's

Millenium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Garut Kota diimplementasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian yang serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Garut Kota Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Garut Kota diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Garut Kota sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang

peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti Karacak Valley. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Garut Kota melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

- b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan
 1. Jumlah Program, Jumlah Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan
Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Garut Kota Tahun 2023 adalah 6 Program, 14 Kegiatan, 40 Sub Kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Garut Kota sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Garut Kota dan mencakup semua Kelurahan.
 5. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 35.809.063.825,-

Adapun Program/Kegiatan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran dengan kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah anggaran dengan Sub Kegiatan :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub kegiatan :

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan :

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan :

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan :

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Kulon

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Wetan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margawati

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuwon

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muarasanding

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukamentri

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciwalen

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paminggir

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Regol

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukanegla

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuncang

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Kulon

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Wetan

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Margawati

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakuwon

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muarasanding

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamentri

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ciwalen

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paminggir

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Regol

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukanegla

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cimuncang

Evaluasi Kelurahan

- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan :

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan sebagai berikut :

❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan termasuk semua Kelurahan.

6. Program Pengawasan Pemerintah Desa dengan Kegiatan sebagai berikut :

❖ Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan :

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

TABEL 3.2

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
7																					
UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1																				
KECAMATAN																					
7	1	1																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
7	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7	1	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	7.253.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		7.979.300		
7	1	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		5.500.000		
7	1	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		5.500.000		

7	1	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
7	1	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
7	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
7	1	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8.980.515.900				9.878.566.500
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota, Pakuwon	100 %	405 orang	12 bulan	8.957.705.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.853.475.500

7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	1 Laporan	12 Bulan	22.810.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.091.000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								18.127.500				19.940.250	
7	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	25 paket	25 orang	8.127.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.940.250
7	1	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Capaian pemenuhan laporan administrasi kepegawaian	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	15 orang	1 laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11.000.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.453.576.463				2.698.932.900	
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	1 paket	12 Bulan	94.849.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	104.334.000

7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	1 paket	12 Bulan	1.657.591.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.823.351.000
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	1 paket	12 Bulan	84.138.563	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	92.552.400
7	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	1 paket	12 Bulan	202.744.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	223.018.000
7	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	96.457.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	106.103.000
7	1	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	12 Laporan	12 Bulan	188.265.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	207.091.500

7	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	12 Laporan	12 Bulan	124.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	136.983.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							7.172.774.900				7.890.052.390	
7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah paket mebel yang disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	7 Item	100 %	51.004.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	56.105.390
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	11 unit	12 Bulan	25.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	28.567.000
7	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pengadaan tanah Jumlah Unit Gedung kantor yang dibangun	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	2 lokasi, 4 unit	12 Bulan	7.095.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.805.380.000

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						130.146.188					143.140.807		
7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon Air dan Listrik yang disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan daerah	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	12 laporan	12 Bulan	84.158.188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	92.574.007
7	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan daerah	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	12 laporan	12 Bulan	17.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	18.898.000
7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan daerah	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	12 laporan	12 Bulan	28.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	31.668.800
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						670.102.000					737.112.000		
7	1	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	100 %	29 unit	100 %	35.102.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	38.612.000
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diRehabilitasi	Terlaksananya Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	100 %	5 Gedung	100 %	635.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	698.500.000

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							683.993.000					752.392.300	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							509.366.000					560.302.600	
7	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	12 Bulan	1 kegiatan	509.366.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	560.302.600
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							174.627.000				192.089.700		
7	1	2	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	3 Jenis	1 laporan	174.627.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	192.089.700
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							4.029.062.400				4.431.968.640		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							46.688.000				51.356.800		
7	1	3	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	12 Bulan	11 Kelurahan	11 Kelurahan	34.298.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	37.727.800
7	1	3	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	12 Bulan	11 Lokasi	11 Kelurahan	12.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	13.629.000

7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						3.982.374.400					4.380.611.840	
7	1	3	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	11 Kelurahan	11 Laporan	11 Kelurahan	3.982.374.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	4.380.611.840
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						234.930.000					258.423.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						234.930.000					258.423.000	
7	1	4	7.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Anggota Satpol PP	Capaian pemenuhan laporan penanganan gangguan trantibum	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	12 laporan	100%	179.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	197.835.000
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah pelaksanaan aktivitas keagamaan	Capaian pemenuhan laporan penanganan gangguan trantibum	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	1 laporan	100%	55.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	60.588.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						306.919.900					414.242.600	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						306.919.900					337.611.100	
7	1	5	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	12 Bulan	30 orang	12 Bulan	9.920.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	10.912.100

7	1	5	2.01	02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	12 Bulan	30 orang	12 Bulan	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	60.500.000		
7	1	5	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	241.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	266.199.000		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							69.665.000							76.631.500	
7	1	6	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							69.665.000								76.631.500
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	Terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	Capaian pemenuhan laporan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	11 Kelurahan	5 Dokumen	12 Bulan	69.665.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	100 %	76.631.500		

Kelurahan Kota Kulon

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000							1.102.200.000	
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000								1.102.200.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000								1.102.200.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000								1.102.200.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	6 unit	100%	859.452.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	945.397.706		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	7 Pokmas /Ormas	100%	142.547.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	156.802.294		
TOTAL													1.002.000.000						1.102.200.000	

Kelurahan Kota Wetan

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.001.124						1.102.201.236	
7	01				KECAMATAN							1.002.001.124							1.102.201.236
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.001.124							1.102.201.236
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.001.124							1.102.201.236
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	6 unit	100%	905.752.274	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	996.327.501	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	3 Pokmas /Ormas	100%	96.248.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	105.873.735	
TOTAL												1.002.001.124						1.102.201.236	

Kelurahan Margawati

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000						1.102.200.000	
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	8 unit	100%	979.794.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.077.773.774	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	1 Pokmas /Ormas	100%	22.205.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	24.426.226	
TOTAL												1.002.000.000						1.102.200.000	

Kelurahan Pakuwon

7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.001.995.475						1.122.195.023	
7	01				KECAMATAN								1.001.995.475							1.122.195.023
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.001.995.475							1.122.195.023
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.001.995.475							1.122.195.023
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Kota Pakuwon	100%	3 unit	100%	583.144.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	641.458.538		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Kota Pakuwon	100%	8 Pokmas /Ormas	100%	418.851.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	480.736.485		
TOTAL												1.001.995.475						1.122.195.023		

Kelurahan Muarasanding

7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.002.000.000						1.102.200.000	
7	01				KECAMATAN								1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Kota Pakuwon	100%	6 unit	100%	931.772.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.024.949.200		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Kota Pakuwon	100%	2 Pokmas /Ormas	100%	70.228.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	77.250.800		
TOTAL												1.002.000.000						1.102.200.000		

Kelurahan Sukamentri

7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.002.000.075						1.102.200.083	
7	01				KECAMATAN								1.002.000.075							1.102.200.083
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.002.000.075							1.102.200.083
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.002.000.075							1.102.200.083
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	6 unit	100%	916.375.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.008.013.463		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	3 Pokmas /Ormas	100%	85.624.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	94.186.620		
TOTAL												1.002.000.075						1.102.200.083		

Kelurahan Ciwalen

7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.002.000.000						1.102.200.000	
7	01				KECAMATAN								1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	5 unit	100%	731.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	804.974.500		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	5 Pokmas /Ormas	100%	270.205.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	297.225.500		
TOTAL												1.002.000.000						1.102.200.000		

Kelurahan Paminggir

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000						1.102.200.000	
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	7 unit	100%	877.212.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	964.934.190	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	3 Pokmas /Ormas	100%	124.787.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	137.265.810	
TOTAL												1.002.000.000						1.102.200.000	

Kelurahan Regol

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000						192.744.600	
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000							192.744.600
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000							192.744.600
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000							192.744.600
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	4 unit	100%	918.641.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	101.050.690	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	2 Pokmas /Ormas	100%	83.358.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	91.693.910	
TOTAL												1.002.000.000						192.744.600	

Kelurahan Sukanegla

7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.002.000.000					1.102.200.000	
7	01				KECAMATAN								1.002.000.000						1.102.200.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.002.000.000						1.102.200.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.002.000.000						1.102.200.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	6 unit	100%	882.295.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	970.525.215	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	4 Pokmas /Ormas	100%	119.704.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	131.674.785	
TOTAL												1.002.000.000					1.102.200.000		

Kelurahan Cimuncang

7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.002.000.000					1.102.200.000	
7	01				KECAMATAN								1.002.000.000						1.102.200.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.002.000.000						1.102.200.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.002.000.000						1.102.200.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	4 unit	100%	815.679.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	897.247.945	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	4 Pokmas /Ormas	100%	186.320.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	204.952.055	
TOTAL												1.002.000.000					1.102.200.000		

Sumber : Pengolahan Data SIPD Rancangan Akhir RKPD Kecamatan Garut Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 14 Kegiatan, 40 Sub kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut sebesar Rp. 35.809.063.825,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 35.809.063.825,- dengan kegiatan sebagai berikut :

❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 7.254.000,-

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 5.000.000,-

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD dengan anggaran Rp. 5.000.000,-

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 5.000.000,-

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp. 5.000.000,-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 5.000.000,-

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 5.000.000,-

❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 8.980.516.000,- dengan Sub Kegiatan :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran Rp. 8.957.705.000,-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran Rp. 22.811.000,-

❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan jumlah Anggaran Rp. 18.127.500,- dengan Sub Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, anggaran Rp. 8,127,500,-

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran Rp. 10.000.000,-

- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 1.497.125.000,- dengan Sub Kegiatan :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 94.85.000,-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebesar Rp. 750.998.000,-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 188.276.000,-

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 202.744.000,-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp. 46.535.000,-

Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp. 171.150.000,-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran Rp. 12.581.000,-

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD , anggaran Rp. 5.000.000,-

- ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah Rp. 7.172.775.000,- dengan Sub kegiatan :

Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 51.004.900,-

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 25.970.000,-

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 7.095.800.000,-

- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah Rp. 130.154.000,- dengan Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 84.161.000,-

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebesar Rp. 17.182.000,-

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran Rp. 28.811.000,-

- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah anggaran Rp. 670.111.000,- dengan Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran sebesar Rp. 35.102.000,-

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran Rp. 635.009.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, jumlah anggaran Rp. 596.336.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :

❖ Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 509.362.000,- dengan Sub Kegiatan :

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, anggaran Rp. 509.362.000,-

❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 86.974.000,- dengan Sub Kegiatan :

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, anggaran Rp. 86.974.000,-

3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran Rp. 15.983.783.325,- dengan kegiatan sebagai berikut :

❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 11.231.898.325,- dengan Sub Kegiatan :

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, anggaran Rp. 197.452.000,-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Kulon, anggaran Rp. 859.452.460,-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Wetan, anggaran Rp. 905.752.274,-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margawati, anggaran Rp. 979.794.340,-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuwon, anggaran Rp. 583.144.125,-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muarasanding, anggaran Rp. 931.772.000,-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukamentri, anggaran Rp. 916.375.875,-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciwalen, anggaran Rp. 731.795.000,-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paminggir, anggaran Rp. 877.212.900,-

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Regol, anggaran Rp. 918.641.900,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukanegla, anggaran Rp. 882.295.650,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuncang, anggaran Rp. 815.679.950,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Kulon, anggaran sebesar Rp. 142.547.540,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Wetan, anggaran sebesar Rp. 96.248.850,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Margawati, anggaran sebesar Rp. 22.205.660,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakuwon, anggaran sebesar Rp. 418.851.350,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muarasanding, anggaran sebesar Rp. 70.228.000,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamentri, anggaran sebesar Rp. 85.624.200,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ciwalen, anggaran sebesar Rp. 270.205.000,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paminggir, anggaran sebesar Rp. 124.787.100,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Regol, anggaran sebesar Rp. 83.358.100,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukanegla, anggaran sebesar Rp. 119.704.350,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cimuncang, anggaran sebesar Rp. 186.320.050,-
- Evaluasi Kelurahan dengan anggaran Rp. 12.445.000,-
- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, anggaran Rp. 3.982.374.400,- dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, anggaran sebesar Rp. 3.982.374.400,-

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum, dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, anggaran Rp. 234.930.000,- dengan Sub Kegiatan :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, anggaran Rp. 179.850.000,-
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat anggaran Rp. 55.080.000,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 306.919.900,- dengan Sub Kegiatan :
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah anggaran Rp. 9.920.100,-
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan jumlah anggaran Rp. 55.000.000,-
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan termasuk semua Kelurahan dengan jumlah anggaran Rp. 241.999.800,-
6. Program Pengawasan Pemerintah Desa dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, anggaran Rp. 69.665.000,- dengan Sub Kegiatan :
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan jumlah anggaran Rp. 69.665.000,-

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimple mentasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Garut Kota Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Garut Kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1									35.809.063.825								38.907.031,608
7	1	1								19.462.496.851								21.408.724.147
7	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					37.253.900								40.979.300
7	1	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	7.253.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.979.300
7	1	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
7	1	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000

7	1	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
7	1	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
7	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
7	1	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8.980.515.900				9.878.566.500	
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Garut Kota, Pakuwon	100 %	405 orang	12 bulan	8.957.705.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.853.475.500

7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	1 Laporan	12 Bulan	22.810.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.091.000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								18.127.500				19.940.250	
7	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	25 paket	25 orang	8.127.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.940.250
7	1	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Capaian pemenuhan laporan administrasi kepegawaian	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	15 orang	1 laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11.000.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.453.576.463				2.698.932.900	
7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	1 paket	12 Bulan	94.849.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	104.334.000

7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	1 paket	12 Bulan	1.657.591.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.823.351.000
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	1 paket	12 Bulan	84.138.563	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	92.552.400
7	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	1 paket	12 Bulan	202.744.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	223.018.000
7	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	96.457.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	106.103.000
7	1	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Kota Pakuwon	100 %	12 Laporan	12 Bulan	188.265.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	207.091.500

7	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	12 Laporan	12 Bulan	124.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	136.983.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.500.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							7.172.774.900					7.890.052.390	
7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah paket mebel yang disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	7 Item	100 %	51.004.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	56.105.390
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	11 unit	12 Bulan	25.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	28.567.000
7	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pengadaan tanah Jumlah Unit Gedung kantor yang dibangun	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	2 lokasi, 4 unit	12 Bulan	7.095.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.805.380.000

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							130.146.188						143.140.807
7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon Air dan Listrik yang disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan daerah	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	12 laporan	12 Bulan	84.158.188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	92.574.007
7	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan daerah	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	12 laporan	12 Bulan	17.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	18.898.000
7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan daerah	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	12 laporan	12 Bulan	28.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	31.668.800
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							670.102.000					737.112.000	
7	1	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	100 %	29 unit	100 %	35.102.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	38.612.000
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diRehabilitasi	Terlaksananya Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	100 %	5 Gedung	100 %	635.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	698.500.000

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							683.993.000					752.392.300	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							509.366.000					560.302.600	
7	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	12 Bulan	1 kegiatan	509.366.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	560.302.600
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							174.627.000				192.089.700		
7	1	2	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	3 Jenis	1 laporan	174.627.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	192.089.700
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							4.029.062.400				4.431.968.640		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							46.688.000				51.356.800		
7	1	3	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	12 Bulan	11 Kelurahan	11 Kelurahan	34.298.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	37.727.800
7	1	3	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	12 Bulan	11 Lokasi	11 Kelurahan	12.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	13.629.000

7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							3.982.374.400					4.380.611.840
7	1	3	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terseleenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	11 Kelurahan	11 Laporan	11 Kelurahan	3.982.374.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	4.380.611.840
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							234.930.000				258.423.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							234.930.000				258.423.000	
7	1	4	7.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Anggota Satpol PP	Capaian pemenuhan laporan penanganan gangguan trantibum	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	12 laporan	100%	179.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	197.835.000
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah pelaksanaan aktivitas keagamaan	Capaian pemenuhan laporan penanganan gangguan trantibum	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100 %	1 laporan	100%	55.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	60.588.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							306.919.900				414.242.600	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							306.919.900				337.611.100	
7	1	5	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	12 Bulan	30 orang	12 Bulan	9.920.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	10.912.100

7	1	5	2.01	02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	12 Bulan	30 orang	12 Bulan	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	60.500.000
7	1	5	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	241.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	266.199.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							69.665.000			76.631.500			
7	1	6	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							69.665.000			76.631.500			
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	Terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	Capaian pemenuhan laporan fasilitasi rekomendasi dan koordinasipembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	11 Kelurahan	5 Dokumen	12 Bulan	69.665.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	100 %	76.631.500

Kelurahan Kota Kulon

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000			1.102.200.000			
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000			1.102.200.000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000			1.102.200.000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000			1.102.200.000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	6 unit	100%	859.452.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	945.397.706
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	7 Pokmas /Ormas	100%	142.547.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	156.802.294
TOTAL												1.002.000.000			1.102.200.000			

Kelurahan Kota Wetan

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.001.124						1.102.201.236	
7	01				KECAMATAN							1.002.001.124							1.102.201.236
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.001.124							1.102.201.236
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.001.124							1.102.201.236
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	6 unit	100%	905.752.274	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	996.327.501	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	3 Pokmas /Ormas	100%	96.248.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	105.873.735	
TOTAL												1.002.001.124						1.102.201.236	

Kelurahan Margawati

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000						1.102.200.000	
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	8 unit	100%	979.794.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.077.773.774	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	1 Pokmas /Ormas	100%	22.205.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	24.426.226	
TOTAL												1.002.000.000						1.102.200.000	

Kelurahan Pakuwon

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.001.995.475		1.122.195.023				
7	01				KECAMATAN							1.001.995.475		1.122.195.023				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.001.995.475		1.122.195.023				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.001.995.475		1.122.195.023				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	3 unit	100%	583.144.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	641.458.538
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	8 Pokmas /Ormas	100%	418.851.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	480.736.485
TOTAL												1.001.995.475		1.122.195.023				

Kelurahan Muarasanding

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000		1.102.200.000				
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000		1.102.200.000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000		1.102.200.000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000		1.102.200.000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	6 unit	100%	931.772.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.024.949.200
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	2 Pokmas /Ormas	100%	70.228.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	77.250.800
TOTAL												1.002.000.000		1.102.200.000				

Kelurahan Sukamentri

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.075		1.102.200.083			
7	01				KECAMATAN							1.002.000.075		1.102.200.083			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.075		1.102.200.083			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.075		1.102.200.083			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	6 unit	100%	916.375.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1.008.013.463
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	3 Pokmas /Ormas	100%	85.624.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	94.186.620
TOTAL												1.002.000.075		1.102.200.083			

Kelurahan Ciwalen

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000		1.102.200.000			
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000		1.102.200.000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000		1.102.200.000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000		1.102.200.000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	5 unit	100%	731.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	804.974.500
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	5 Pokmas /Ormas	100%	270.205.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	297.225.500
TOTAL												1.002.000.000		1.102.200.000			

Kelurahan Paminggir

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000							1.102.200.000	
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000								1.102.200.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000								1.102.200.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000								1.102.200.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	7 unit	100%	877.212.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	964.934.190		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	3 Pokmas /Ormas	100%	124.787.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	137.265.810		
TOTAL												1.002.000.000							1.102.200.000	

Kelurahan Regol

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000							192.744.600	
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000								192.744.600
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000								192.744.600
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000								192.744.600
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	4 unit	100%	918.641.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	101.050.690		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	2 Pokmas /Ormas	100%	83.358.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	91.693.910		
TOTAL												1.002.000.000							192.744.600	

Kelurahan Sukanegla

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000						1.102.200.000	
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	6 unit	100%	882.295.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	970.525.215	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	4 Pokmas /Ormas	100%	119.704.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	131.674.785	
TOTAL												1.002.000.000						1.102.200.000	

Kelurahan Cimuncang

7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.002.000.000						1.102.200.000	
7	01				KECAMATAN							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.002.000.000							1.102.200.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	4 unit	100%	815.679.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	897.247.945	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut Garut Kota Pakuwon	100%	4 Pokmas /Ormas	100%	186.320.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	204.952.055	
TOTAL												1.002.000.000						1.102.200.000	

Sumber : Pengolahan Data SIPD Kecamatan Garut Kota Penetapan Rancangan Akhir RKPD

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Garut Kota dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Garut Kota

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu dilakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Garut Kota.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Garut Kota ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi Rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan

semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **“Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera”**.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN